

Center for International Forestry Research

Forests and Governance Programme

Governance Brief

Juni 2005
Nomor 10

# Mengembalikan Kejayaan Hutan Kemiri Rakyat

**Yusran**
Dosen Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin

## Haji Kemiri: Bukti Kesuksesan Hutan Rakyat

Hutan kemiri rakyat di kawasan Pegunungan Bulusaraung Kabupaten Maros telah dikenal sejak lama. Antara tahun 1960-an sampai 1980 dikenal sebagai penghasil kemiri terbesar dengan kualitas terbaik di Indonesia. Saat itu kemiri merupakan simbol status sosial dan menjadi primadona masyarakat karena menjadi sumber pendapatan utama yang menyejahterakan masyarakat. Haji kemiri merupakan bukti sekaligus ungkapan masyarakat untuk menunjukkan besarnya keuntungan yang diperoleh dari hutan kemiri saat itu. Luas hutan kemiri saat ini diperkirakan seluas 9.200 Ha dengan produksi 5.608 ton dan melibatkan 10.489 petani. Namun sayangnya ketidakpastian status lahan kemiri yang berada dalam kawasan hutan (TGHK) berdampak negatif terhadap kelestarian usaha rakyat ini.

## Konflik Lahan: Siapa yang untung?

Permasalahan utama dalam pengelolaan hutan kemiri rakyat saat ini adalah faktor ketidakpastian penguasaan lahan. Sebagian besar areal lahan kemiri yang diklaim milik oleh masyarakat berada dalam kawasan hutan negara (versi TGHK). Masyarakat mempunyai keyakinan bahwa lahan tersebut adalah miliknya yang telah dikelola secara turun temurun. Hasil penelitian yang dilakukan pada bulan April sampai Oktober 2004 pada tiga bentuk status penguasaan lahan kemiri (lahan milik, tanah negara dan kawasan hutan) menemukan beberapa kesimpulan: 1). Ketidakpastian status lahan merupakan faktor utama yang menentukan kelestarian hutan kemiri, 2). Semakin kuat status lahan semakin besar nilai ekonomi, 3). Ketidakpastian status lahan menyebabkan melemahnya kelembagaan lokal.

Dampak langsung dari ketidakpastian status penguasaan lahan adalah proses peremajaan kemiri terhambat. Akibatnya komposisi tegakan kemiri saat ini didominasi tegakan tua dan menyebabkan penurunan produktivitas hutan kemiri. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Yusran (1999) yang menunjukkan bahwa 79 % pohon kemiri di Kawasan Pegunungan Bulusaraung Kabupaten Maros termasuk kategori umur tua (tidak produktif), hanya 19 % umur produktif dan 2 % umur muda, dengan rata-rata umur adalah 45 tahun. Jelas tidak terjadi proses regenerasi sehingga komposisi tegakan kemiri jauh dari komposisi yang ideal. Kondisi ini akan memberikan dampak langsung terhadap produksi dan kelestarian hutan kemiri.

Perbedaan status penguasaan lahan juga berpengaruh pada struktur, komposisi tanaman dan intensitas pengelolaan. Pada lahan yang mempunyai status kepemilikan yang kuat, pohon kemiri umumnya ditanam bercampur dengan berbagai jenis tanaman yang bernilai ekonomis dengan sistem agroforestry dan pengelolaannya dilakukan lebih intensif. Lahan kemiri yang status kepemilikannya lemah, umumnya menunjukkan pola tanam kemiri monokultur dengan pengelolaan yang sangat rendah.

Dampak ekonomi langsung dari ketidakpastian hak penguasaan lahan menyebabkan terus menurunnya pendapatan masyarakat dari kemiri. Sekitar sepuluh ribuan ekonomi rumah tangga akan merasakan dampak dari penurunan pendapatan tersebut. Minat masyarakat dalam pengelolaan kemiri akan menurun dan akan menyebabkan hilangnya kesempatan kerja sebagian besar masyarakat.

Membiarkan ketidakpastian status lahan kemiri tanpa ada upaya penyelesaian hanya akan merugikan masyarakat dan menghilangkan fungsi lingkungan. Semua pihak pada akhirnya tidak akan mendapatkan manfaat apapun, semuanya akan menuai kerugian.

## Mengapa Hutan Kemiri Penting?

**Sumber Pendapatan Masyarakat.** Kemiri sebagai sumber pendapatan tetap rumah tangga telah dirasakan sejak lama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiri merupakan faktor pengaman ekonomi rumah tangga. Meskipun kontribusi kemiri saat ini terhadap total pendapatan rumah tangga hanya sekitar 10 – 13 % namun sangat strategis terhadap kelangsungan ekonomi masyarakat. Kemiri menjadi sumber dana cadangan untuk menutupi kebutuhan masyarakat. Biji kemiri tahan disimpan sampai dua tahun, sehingga memungkinkan petani untuk menjualnya pada saat dibutuhkan.



Kemiri sebagai sumber pendapatan masyarakat (Foto oleh Yusran)

**Peluang Pasar Terbuka.** Kemiri merupakan komoditi yang mempunyai prospek pasar yang cukup luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemiri mempunyai nilai ekonomi tinggi sebagai bahan produk mulai dari penyedap makanan sampai bahan baku industri dan perabot rumah tangga. Produk kemiri dapat dimanfaatkan sebagai bumbu masak, obat-obatan, minyak kemiri untuk perawatan rambut dan kecantikan, bahan baku industri sabun dan cat, kayu bakar, korek api, perabot rumah tangga, papan pengepak, pulb, dan vinir kayu lapis.

**Menjaga Kualitas Lingkungan**. Keberadaan hutan kemiri sangat strategis dalam menjaga kualitas lingkungan karena letaknya di hulu sungai Walanae yang merupakan daerah tangkapan air. Kerusakan hutan kemiri ini akan berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar, khususnya sistem tata air yang sangat penting bagi sektor pertanian serta aspek kehidupan lainnya.

## Apa yang harus dilakukan?

Sebelum menjawab apa yang harus dilakukan, maka pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah apakah kejayaan hutan kemiri dapat dikembalikan? Jawabannya ya, hal ini didasarkan hasil penelitian yang menunjukkan: 1). Minat masyarakat terhadap kemiri masih sangat tinggi karena faktor sejarah sukses masa lalu, 2). Sistem kelembagaan lokal yang terbangun telah menjadi bagian dari sistem nilai dan budaya masyarakat yang sangat penting dan menentukan keberlanjutan hutan kemiri, 3). Keadaan biofisik sangat sesuai untuk pengembangan kemiri.

Berdasarkan hasil penelitian kondisi hutan kemiri saat ini, strategi yang harus dilakukan untuk melestarikan hutan kemiri adalah: (1) menjamin kepastian penguasaan lahan dengan mengakui hak kelola masyarakat. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah dan dukungan berbagai

pihak dalam sistem pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat, (2) mengembangkan pola agroforestri untuk meningkatkan produktivitas lahan dan diversifikasi produk, dan (3) memperkuat kelembagaan dan kapasitas petani dalam sistem pemasaran. Faktor harga dan pasar merupakan ancaman, sementara di sisi lain potensi pasar dan mitra usaha masih sangat terbuka.

Ketidakpastian lahan perlu diselesaikan melalui dialog dengan berbagai pihak terkait. Pemerintah Kabupaten dan DPRD Maros dapat memprakarsai dengan mengundang wakil masyarakat pemilik lahan kemiri, tokoh masyarakat, kepala desa, LSM, Perguruan Tinggi dan Instansi terkait. Otonomi Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD untuk mengambil inisiatif-inisiatif dalam mengembangkan potensi daerah masing-masing. Payung Hukum SK.31/kpts-II/2001 tentang Hutan Kemasyarakatan atau PP.34/2002 tentang Tata Hutan dan Pengurusan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dapat dijadikan acuan awal untuk menyelesaikan permasalahan ketidakpastian lahan tersebut.



Hutan kemiri rakyat dikawasan Pegunungan Bulusaraung Kabupaten Maros (Foto oleh Yusran)

## Kesimpulan

Permasalahan ketidakpastian status lahan harus segera diselesaikan karena menjadi faktor kunci untuk mengembalikan kejayaan kemiri.

Ketidakpastian status lahan akan menghilangkan manfaat ekonomi dan lingkungan hutan kemiri. Semua pihak akhirnya tidak akan mendapatkan manfaat apapun, bahkan sumberdaya alamnya pun akan mengalami kerusakan.

## Rekomendasi

Pemerintah Kabupaten Maros agar mengusulkan kepada Departemen Kehutanan untuk menetapkan wilayah hutan kemiri rakyat menjadi kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk menjamin hak kelola masyarakat dan kelestarian hutan kemiri.

Governance brief ini ditulis dalam rangka partisipasi penulis dalam program "Building Leadership for Forest Reforms of the Future" yang diselenggarakan atas kerjasama CIFOR dan Ford Foundation Jakarta dan merupakan ringkasan thesis Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan Sekolah (S3) Institut Pertanian Bogor, 2005 dengan judul "Analisis Performansi dan Pengembangan Hutan Kemiri Rakyat di Kawasan Pegunungan Bulusaraung Sulawesi Selatan".

**Center for International Forestry Research, CIFOR**
*Alamat kantor:* Jalan CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang
Bogor Barat 16680, Indonesia.
*Alamat surat:* P.O. Box. 6596 JKPWB, Jakarta 10065
Indonesia

Tel: +62(251) 622 622 Fax: +62(251) 622 100
E-mail: *cifor@cgiar.org*
Website: *www.cifor.cgiar.org*
Foto-foto oleh: Yusran

Program *Forests and Governance* di CIFOR mengkaji cara pengambilan dan pelaksanaan keputusan berkenaan dengan hutan dan masyarakat yang hidupnya bergantung dari hutan. Tujuannya adalah meningkatkan peran serta dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang berdaya, meningkatkan tanggung jawab dan transparansi pembuat keputusan dan kelompok yang lebih berdaya dan mendukung proses-proses yang demokratis dan inklusif yang meningkatkan keterwakilan dan pengambilan keputusan yang adil di antara semua pihak.